JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 05, Mei 2025

Kajian Filsafat Pendidikan dan Implikasinya

Meza Hadevi[1], Mini Puspita Sari[2], Yogi Rizki Oktara[3], Susiyanto[4], Merri Sri Hartati[5]
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia[1,2,3,4,5]
Emails: mezahadevi35@guru.sma.belajar.id, minipuspitasari6@gmail.com, yogioktara99@guru.sma.belajar.id, susiyanto@umb.ac.id, merrisrihartati@umb.ac.id

Abstrak

Kajian filsafat pendidikan merupakan landasan penting dalam memahami dan merumuskan prinsip, nilai, serta arah pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi cabang-cabang filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun kerangka pendidikan yang holistik dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik utama, yang mencakup analisis terhadap karya-karya tokoh filsafat pendidikan seperti John Dewey dan Paulo Freire. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk merespons berbagai tantangan pendidikan, termasuk dehumanisasi sistem pembelajaran dan krisis nilai di tengah perkembangan teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan filosofis dalam pendidikan dapat memberikan arah yang lebih bermakna dan transformatif dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi perspektif filosofis dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: filsafat pendidikan, ontologi, epistemologi, aksiologi, pendidikan transformatif

Abstract

The study of philosophy of education plays a vital role in understanding and formulating foundational principles, values, and goals of education that align with the challenges of the modern era. This research aims to explore the contributions of philosophical branches such as ontology, epistemology, and axiology in constructing a holistic and human-centered educational framework. A qualitative research method was employed using literature review as the primary technique, focusing on the analysis of key educational philosophers such as John Dewey and Paulo Freire. The findings reveal that philosophy of education functions not only as a theoretical foundation but also as a practical guide to address contemporary educational challenges, including dehumanized learning systems and moral crises amid technological development. The results emphasize that philosophical approaches in education can provide a more meaningful and transformative direction in shaping individuals who are intellectually competent and morally and socially responsible. The study implies the need for integrating philosophical perspectives into national education curricula and policy as part of sustainable education reform.

Keywords: *philosophy of education, ontology, epistemology, axiology, transformative education*

PENDAHULUAN

Filsafat pendidikan adalah salah satu cabang filsafat yang secara mendalam membahas konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sebagai upaya membentuk individu yang memiliki kemampuan berfikir dan

moral, filsafat pendidikan berfungsi sebagai teori, dan juga sebagai panduan praktis dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di era modern. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah "rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, bertujuan untuk membangun individu dan masyarakat yang lebih baik (Dewey, 2024).

Sejalan dengan kemajuan zaman, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin rumit. Globalisasi, transformasi digital, dan dinamika sosial mengharuskan pendidikan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan. Filsafat pendidikan memainkan peran penting dalam merumuskan tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil dalam bidang keilmuan, melainkan juga menitikberatkan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan (Freire, 2020).

Kajian filsafat pendidikan melibatkan berbagai cabang filsafat, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat manusia dan pendidikan, epistemologi mengeksplorasi cara memperoleh dan mengajarkan pengetahuan, sementara aksiologi mempelajari nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat menyusun strategi pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis yang kokoh (McKenzie & Blenkinsop, 2006).

Dalam konteks kebijakan pendidikan, penerapan filsafat pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan peran guru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, filsafat progressivisme yang dikembangkan oleh Dewey mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan relevansi sosial, sehingga pendidikan dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang demokratis (Suparlan, 2004).

Di Indonesia, filsafat pendidikan juga memiliki relevansi yang tinggi dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional. Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa memberikan panduan nilai-nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai religius, nasionalisme, gotong-royong, dan integritas (Kosim, 2011).

Namun, penerapan filsafat pendidikan tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara prinsip filosofis dan implementasi praktis di lapangan. Seringkali, kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya pemahaman tentang filosofi pendidikan di tingkat pelaksana (Benavot, 2016).

Selain itu, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam pendidikan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, muncul kekhawatiran tentang dehumanisasi pendidikan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak dan tetap menghormati nilai-nilai humanisme (Gorski, 2005).

Dalam kajian filsafat pendidikan, penelitian terdahulu oleh McKenzie dan Blenkinsop (2006) menekankan pentingnya "etika kepedulian" (ethic of care) dalam praktik pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan petualangan. Mereka menyoroti bahwa pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antara pendidik dan peserta didik serta mendorong pembelajaran yang lebih bermakna. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada konteks pendidikan luar ruang dan belum secara luas mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam sistem pendidikan formal yang lebih luas.

Sementara itu, Benavot (2016) dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan pendidikan global menyoroti tantangan dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang efektif di berbagai negara. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kebijakan dan belum secara mendalam mengaitkan dengan landasan filosofis pendidikan.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ke dalam analisis sistem pendidikan formal. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan implikasi filsafat pendidikan dalam berbagai aspek, termasuk tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan peran guru. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang filsafat pendidikan, diharapkan sistem pendidikan dapat dirancang untuk menghasilkan pribadi yang bukan saja cakap dibidang keilmuan, namun juga mempunyai etika dan berdaya guna bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Paulo Freire, "Pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan manusia, bukan hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga menginspirasi perubahan" (Freire, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep "merdeka belajar" dari sudut pandang filsafat pendidikan, khususnya melalui telaah terhadap prinsip-prinsip ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut M. Nazir dalam Susilawati (2021), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah literatur, buku, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku teks filsafat pendidikan, artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2018 hingga 2024, dokumen kebijakan pendidikan nasional Indonesia, serta karya-karya pemikir seperti John Dewey dan Paulo Freire. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi topik, kualitas akademik, dan kontribusi terhadap wacana filsafat pendidikan kontemporer.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama: pertama, reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan memilah informasi dari berbagai literatur yang relevan untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti kebebasan belajar, pendidikan humanistik, dan peran guru. Kedua, penyajian data, yaitu pengorganisasian kutipan dan gagasan utama ke dalam kerangka tematik yang menggambarkan keterkaitan antara prinsip filsafat pendidikan dan konsep merdeka belajar. Ketiga, penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interpretatif dan reflektif guna merumuskan sintesis pemikiran dari berbagai sumber. Untuk memastikan validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai jenis dokumen dan referensi yang berasal dari perspektif filsafat Barat, kebijakan pendidikan nasional, dan kajian akademik sebelumnya. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan kontekstual tentang kontribusi filsafat pendidikan terhadap pengembangan konsep merdeka belajar di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip mendasar, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hakikat pendidikan, termasuk apa yang ingin dicapai, bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, dan nilai-nilai yang harus dibangun melalui proses pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan kerangka teoritis untuk memahami peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat, serta menawarkan pedoman dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan praktik pendidikan.

Menurut John Dewey, filsafat pendidikan adalah "proses pembentukan kemampuan dasar intelektual dan moral yang diperlukan untuk kehidupan yang baik" (Dewey, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan semata terbatas pada pengembangan kemampuan akademik, tetapi juga mencakup penyempurnaan kepribadian dan moral individu, agar mereka mampu hidup selaras dalam masyarakat.

Filsafat pendidikan juga berfungsi sebagai alat refleksi untuk mengevaluasi praktik pendidikan yang ada, memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai humanisme, keadilan, dan keberlanjutan. Kajian filsafat pendidikan memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti: "Apakah yang dimaksud dengan pendidikan?", "Apa tujuan dari pendidikan?", serta "Bagaimana pendidikan dapat diterapkan secara efektif?".

Dengan kata lain, filsafat pendidikan tidak hanya membahas "apa yang ada" dalam pendidikan, tetapi juga "apa yang seharusnya ada". Sebagai contoh, Aristoteles melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kebajikan manusia melalui pengembangan intelek dan karakter (Pakaluk, 2005). Hal ini menunjukkan bagaimana filsafat pendidikan menjadi panduan dalam membangun manusia yang utuh.

Cabang-Cabang Filsafat Pendidikan

1. Ontologi Pendidikan

Ontologi dalam filsafat pendidikan membahas hakikat pendidikan, termasuk apa yang dimaksud dengan pendidikan dan tujuan utamanya. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti "Apa itu pendidikan?" dan "Apa hakikat manusia dalam konteks pendidikan?". Dalam pandangan ontologi, pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan manusia yang ideal, yaitu individu yang mampu berpikir kritis, berperilaku etis, dan berkontribusi pada masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual (Freire, 2020).

Sebagai cabang filsafat, ontologi pendidikan juga membahas hubungan antara pendidik, peserta didik, dan proses pembelajaran. Menurut Paulo Freire, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi dialog antara manusia untuk membangun kesadaran kritis dan kebebasan (Dewey, 2024). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang terampil secara teknis, tetapi juga untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran sosial dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan.

2. Epistemologi Pendidikan

Epistemologi pendidikan berfokus pada cara pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan diterapkan dalam proses belajar-mengajar. Dalam konteks pendidikan, epistemologi mengeksplorasi pertanyaan seperti "Bagaimana siswa memahami suatu konsep?", "Apa metode terbaik untuk mengajarkan pengetahuan?", dan "Bagaimana validitas

pengetahuan dapat diuji?". Salah satu pendekatan dalam epistemologi pendidikan adalah konstruktivisme, yang mengatakan bahwasnya peserta didik dapat menciptakan pengetahuannya sendiri dengan berkaca pada pengalaman dan keterlibatan mereka dengan lingkungan (Piaget, 1970).

Epistemologi juga menekankan pentingnya pemahaman kritis dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk mengeksplorasi dan membangun pemahaman mereka secara mandiri. Menurut Jean Piaget, pembelajaran yang efektif adalah ketika siswa aktif dalam proses berpikir dan menemukan pengetahuan baru (Vygotsky, 1978). Oleh karena itu, epistemologi pendidikan mendorong metode pembelajaran yang berbasis pengalaman, diskusi, dan eksplorasi. Dengan demikian, siswa tidak sekadar menerima informasi tanpa keterlibatan aktif, tetapi mereka diajak untuk terlibat secara lebih mendalam pada kegiatan belajar mengajar, agar peserta didik mampu memahami materi dengan lebih mendalam dan kritis, serta mampu menghubungkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga menginternalisasi pengetahuan tersebut dan mengaplikasikannya dalam konteks yang lebih luas.

3. Aksiologi Pendidikan

Aksiologi pendidikan membahas nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pendidikan, seperti moralitas, keadilan, dan etika. Pendidikan, dalam perspektif aksiologi, bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Aksiologi mempertanyakan apa nilai-nilai utama yang seharusnya diajarkan melalui pendidikan, serta bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut bisa diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter, misalnya, bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial pada siswa (Suparlan, 2004).

Dalam praktiknya, aksiologi pendidikan juga mencakup bagaimana sistem pendidikan dapat membangun masyarakat yang adil dan beradab. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menciptakan manusia yang "berbudi pekerti luhur" sehingga mampu berperan aktif dalam membangun bangsa yang bermartabat (Dewantara, 1977). Dengan demikian, aksiologi pendidikan bukan saja berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, melainkan juga bagaimana pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan

1. Perennialisme

Perennialisme merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan nilai-nilai yang bersifat universal dan abadi, yang tetap relevan di sepanjang waktu. Dalam pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang rasional, bermoral, dan berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran universal. Tokoh utama perennialisme, seperti Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler, percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada karya-karya klasik yang mencerminkan kebijaksanaan manusia sepanjang sejarah, seperti filsafat Yunani dan sastra besar dunia (Hutchins, 1978).

Filsafat ini melihat pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan daya berpikir kritis serta mengerti dengan baik nilai-nilai moral yang berlaku secara universal. Hutchins menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah "mengajarkan manusia bagaimana berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan" (Adler, 1982). Dalam praktiknya, pendekatan ini sering diterapkan melalui kurikulum berbasis literatur klasik, logika, dan etika.

Meskipun terlihat konservatif, perennialisme dianggap relevan untuk membentuk individu yang mampu menghadapi perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai yang kokoh.

2. Progressivisme

Progressivisme berfokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Tokoh utama aliran ini, John Dewey, percaya bahwa pendidikan adalah proses yang terus berkembang, seperti halnya masyarakat itu sendiri. Filsafat ini melihat pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis serta memaknai secara mendalam nilai-nilai moral yang berlaku secara universal.membangun pemahaman mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan (Dewey, 1938).

Menurut Dewey, pendidikan harus mencerminkan kehidupan nyata dan memberikan siswa keterampilan yang relevan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ia menekankan bahwa "pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama, sehingga siswa dapat menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif." (Dewey, 2024). Pendekatan atau strategi belajar mengajar dengan berbasis proyek *(Project-Based Learning)* adalah satu dari sekian banyak implementasi dari aliran progressivisme, di mana siswa belajar dengan mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan nyata.

3. Esensialisme

Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya penguasaan disiplin ilmu dasar sebagai fondasi pendidikan. Dalam pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan inti yang dianggap esensial, seperti membaca, menulis, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tokoh utama esensialisme, seperti William C. Bagley, percaya bahwa pendidikan harus mengedepankan struktur, keteraturan, dan disiplin (Bagley, 1938).

Esensialisme menekankan peran guru sebagai figur otoritas yang membimbing siswa untuk mencapai penguasaan materi inti. Pendidikan tidak hanya dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk memahami dunia, melainkan juga sebagai cara untuk membentuk karakter melalui kedisiplinan dan kerja keras. Menurut Bagley, "Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memberikan dasar intelektual yang kuat, sehingga siswa dapat belajar mandiri dan menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang" (Weinstein, Mignano and Romano, 2007). Aliran ini sering diterapkan melalui metode pengajaran yang berfokus pada ceramah, latihan, dan evaluasi yang ketat untuk memastikan pemahaman siswa terhadap materi dasar.

Implikasi Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek pendidikan, termasuk tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, peran pendidik, dan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat.

Tujuan Pendidikan

a) Ontologi: Hakikat Manusia dan Pendidikan

Dalam perspektif ontologi, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk sosial dan individu yang memiliki potensi. Pendidikan dianggap sebagai proses yang membantu individu mengenali dan mengembangkan potensi diri untuk menjalani kehidupan yang bermakna di tengah masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pendidikan untuk belajar hidup berdampingan, memahami perbedaan, dan bekerja sama demi menciptakan

harmoni sosial. Sebagai makhluk individu, pendidikan juga berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri (Dewey, 2024). Sebagai contoh, dalam filsafat perennialisme, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berpikir rasional dan bermoral berdasarkan nilai-nilai universal.

b) Aksiologi: Nilai dalam Pendidikan

Dalam ranah aksiologi, pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai moral, etika, dan budaya lokal. Pendidikan bukan saja berpusat pada proses transfer pengetahuan, namun juga pada pembekalan kepribadian dan moral siswa. Nilai-nilai yang diajarkan mencakup kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama. Hal ini penting karena pendidikan adalah instrumen untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan bermartabat. Menurut Paulo Freire, "pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan manusia, memberikan mereka kesadaran tentang nilai-nilai moral dan sosial" (Freire, 2020).

Di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk menciptakan pribadi yang ng beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersesuaian dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideoologi bangsa. Pendidikan Pancasila dan karakter bangsa menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti kejujuran, kerjasama, dan semangat patriotisme. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memaparkan mengenai Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat" (Irawati dan Susetyo, 2017).

Kurikulum Pendidikan

a) Perennialisme

Kurikulum berbasis perennialisme dirancang untuk membangun fondasi intelektual yang kuat dan menanamkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan kepada peserta didik. Selain itu, pendidikan berfokus pada pembentukan manusia yang mampu berpikir kritis dan bijaksana. Menurut Hutchins, "pendidikan klasik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan cara berpikir" (Hutchins, 1978). Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman..

b) Progressivisme

Progressivisme menekankan pentingnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan berorientasi pada perkembangan siswa secara holistik. Kurikulum progressivisme dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman dengan kebutuhan praktis, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. John Dewey, pelopor aliran ini, percaya bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan mencerminkan kehidupan nyata. "Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri" (Dewey, 1938).

Kurikulum dalam progressivisme cenderung fleksibel dan beragam, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan pendekatan interdisipliner menjadi komponen utama dalam metode ini. Kurikulum ini bukan saja mendorong peserta didik untuk memaknai konsep, namun juga untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, progressivisme berusaha menciptakan pendidikan yang relevan dan bermakna, yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia modern (Dewey, 2024).

c) Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai alat untuk membangun kembali masyarakat yang lebih adil, damai, dan demokratis. Kurikulum dalam aliran ini dirancang untuk menanamkan kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif kepada siswa, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial. George S. Counts, salah satu tokoh rekonstruksionisme, menekankan bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik (Counts, 1978).

Kurikulum rekonstruksionisme sering kali memasukkan isu-isu global, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan perdamaian. Metode pembelajaran berbasis diskusi, debat, dan proyek sosial digunakan untuk melibatkan siswa dalam eksplorasi masalah nyata di masyarakat. Menurut Counts, "pendidikan tidak hanya untuk mempertahankan status quo, tetapi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik" (Domanais, 2023). Oleh karena itu, kurikulum ini berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan generasi yang kritis dan bertanggung jawab terhadap perubahan sosial.

Metode Pembelajaran

a) Socratic Method (Dialog Filosofis)

Metode Socratic, atau dialog filosofis, adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan dialog aktif antara guru dan siswa untuk menggali kebenaran. Metode ini dinamai dari filsuf Yunani, Socrates, yang percaya bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui pertanyaan kritis dan eksplorasi ide. Dalam metode ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk merangsang pemikiran siswa, mendorong mereka untuk mengeksplorasi gagasan, serta menemukan jawaban mereka sendiri (Nicolae, 2022).

Metode ini bukan saja berfungsi dalam hal penyampaian wawasan keilmuan, melainkan bisa dipergunakan dalam melatih kemampuan berpikir kritis, logika, dan argumen. Menurut Plato, "metode Socratic memungkinkan siswa untuk menyadari ketidaktahuan mereka dan mendorong mereka untuk mencari kebenaran" (Vlastos, 1994). Proses ini mendorong peserta didik untuk dapat memknai secara detail dan reflektif, serta memperkuat kemampuan mereka untuk mempertahankan pendapat berdasarkan alasan yang logis. Socratic method sering digunakan dalam pendidikan filsafat, hukum, dan studi humaniora, tetapi prinsipnya dapat diterapkan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu.

b) Experiential Learning

Experiential learning adalah metode belajar mengajar yang menitikberatkan pada pengalaman langsung sebagai landasan utama dalam memperoleh pengetahuan. Berakar pada filsafat pragmatisme John Dewey, metode ini mengintegrasikan aktivitas praktis dengan refleksi, sehingga siswa dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep-konsep yang dipelajari. Dewey berpendapat bahwa "pendidikan sejati terjadi ketika siswa aktif terlibat dalam situasi nyata dan menarik kesimpulan melalui pengalaman mereka sendiri" (Dewey, 1938).

Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif sebagai pembelajar yang terlibat langsung dalam proses, seperti melalui proyek lapangan, simulasi, eksperimen laboratorium, atau pembelajaran berbasis proyek. Experiential learning juga melibatkan siklus pembelajaran yang mencakup pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Kolb, salah satu pengembang teori ini, menegaskan bahwa "pembelajaran terjadi ketika individu merefleksikan pengalaman mereka untuk membangun pemahaman baru yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata" (Kolb, 2014). Metode ini efektif dalam

mengembangkan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep yang mendalam.

Peran Guru

a) Guru sebagai Fasilitator

Dalam filsafat progressivisme, guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung peserta didik dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan masalah. John Dewey, sebagai tokoh utama aliran ini, mengatakan bahwasanya seorang pendidik bukan saja berperan sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai pembimbing yang mendukung siswa dalam proses belajar melalui pengalaman. Dewey menyatakan, "Guru harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri, mencari solusi, dan belajar dari kesalahan mereka" (Dewey, 2024).

Sebagai fasilitator, guru menyediakan wadah bagi siswa untuk belajar secara aktif misalnya dengan berdiskusi, percobaan, serta proyek kolaboratif. Guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengembangkan pandangan mereka sendiri. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan mampu mengasah keterampilan berpikir kritis yang akan berguna sepanjang hidup mereka, bukan hanya dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari (Dewey, 1938).

b) Guru sebagai Model Nilai

Dalam perspektif perennialisme dan esensialisme, guru dipandang sebagai panutan moral dan intelektual yang menunjukkan contoh perilaku yang baik dan nilai-nilai universal. Dalam aliran perennialisme, misalnya, guru diharapkan mampu menginspirasi siswa dengan menyampaikan pengetahuan yang bersifat abadi dan mendalam, seperti karya-karya klasik, dan dengan menunjukkan cara hidup yang rasional dan bermoral. Robert Hutchins, tokoh perennialisme, berpendapat bahwa "guru harus menjadi teladan dalam hal intelektualitas dan moralitas, agar siswa tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga cara hidup yang benar (Hutchins, 1978).

Demikian pula, dalam esensialisme, guru berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan dasar dan karakter. Guru tidak saja semata-mata mengajarkan materi pelajaran, namun juga membentuk sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan siswa untuk menjadi individu yang berintegritas. Dalam pandangan ini, guru dianggap sebagai figur yang menunjukkan bagaimana cara hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku, serta bagaimana siswa harus bertindak secara bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan kata lain, guru dalam aliran ini berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak siswa (Bagley, 1938).

c) Guru adalah Agen Perubahan

Pada filsafat rekonstruksionisme, guru mempunyai fungsi penting sebagai agen perubahan sosial yang mendukung semua peserta didik agar dapat memiliki pola pikir kritis dan berperan aktif dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. George S. Counts, salah satu tokoh rekonstruksionisme, berpendapat bahwa pendidikan harus digunakan sebagai alat untuk menciptakan transformasi sosial yang positif. Ia menyatakan, "Pendidikan harus mengajarkan siswa untuk menyadari ketidakadilan sosial dan memberdayakan mereka untuk berperan dalam perubahan yang lebih baik" (Counts, 1978).

Sebagai agen perubahan, guru diharapkan mampu mendukung siswa untuk berpikir tentang permasalahan-permasalahan sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk berperan aktif dalam menciptakan solusi. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoretis,

tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi dan aksi yang relevan dengan masalah dunia nyata, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan pengembangan yang berkelanjutan. Melalui peran ini, guru dapat meningkatkan generasi yang cerdas secara akademik, sekaligus memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan sanggup berkontribusi untuk masyarakat yang lebih baik (Domanais, 2023).

Hubungan Pendidikan dan Masyarakat

a) Pendidikan sebagai Agen Transformasi Sosial

Dalam perspektif rekonstruksionisme, pendidikan dipandang sebagai alat yang sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pendidikan, menurut aliran ini, harus lebih dari sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam perubahan sosial yang lebih luas. George S. Counts, salah satu tokoh utama rekonstruksionisme, berpendapat bahwa "pendidikan harus berfungsi sebagai instrumen untuk membangun dunia yang lebih baik, dengan mengatasi ketidakadilan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu" (Counts, 1978).

Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk mengenali masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan, serta diberdayakan untuk mengambil tindakan dalam menciptakan perubahan. Pada pola pandang ini, guru tidak saja mengajar pengetahuan, tetapi juga memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis tentang keadaan sosial dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai kekuatan pendorong perubahan yang mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis (Domanais, 2023)

b) Pendidikan dan Teknologi

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, filsafat pendidikan mempunyai tanggungjawab yang sangat penting untuk meyakinkan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi memberikan kemudahan dalam pembelajaran, memungkinkan akses informasi yang lebih luas, dan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pendidikan. Namun, tanpa pemahaman yang tepat, teknologi juga bisa menyebabkan isolasi sosial, ketergantungan, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendidikan harus memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang mendukung pengembangan karakter, moral, dan pemahaman kritis siswa terhadap dunia yang semakin terhubung secara digital (Selwyn, 2021).

John Dewey, dalam karyanya *Experience and Education*, mengingatkan bahwa teknologi tidak hanya sebagai alat untuk efisiensi, tetapi harus digunakan untuk mendukung perkembangan pemikiran kritis dan kreatif siswa. "Pendidikan yang baik harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai humanistik, memastikan bahwa teknologi tidak hanya digunakan untuk kepentingan praktis, tetapi juga untuk memajukan kemanusiaan" (Dewey, 1938). Dengan cara ini, filsafat pendidikan tidak hanya berfokus pada alat-alat baru yang digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga pada tujuan untuk menciptkan pribadi yang memiliki pola pikir dan bertanggung jawab dalam menghadapi dunia teknologi yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Filsafat pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai dasar yang membentuk proses pendidikan. Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukanlah semata sebuah proses pemindahan pengetahuan, melainkan juga merupakan upaya untuk membentuk karakter dan

mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Dengan mengacu pada pemikiran tokoh-tokoh seperti John Dewey dan Paulo Freire, kita memahami bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan, dan juga sanggup menjawab problematika yang dating dizaman yang semakin kompleks.

Pendidikan yang efektif harus menggabungkan aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang, agar individu tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi serta kemampuan untuk memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak saja memusatkan perhatian pada kecerdasan kognitif, namun juga pada pembangunan karakteristik dan kemampuan dalam berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, agar dapat menghasilkan generasi yang bukan saja memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan, melainkan juga memiliki etika yang baik dan kemampuan untuk menghadapi serta mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat menciptakan individu yang siap beradaptasi dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

REFERENSI

Adler, M. (1982). The Paideia Proposal: Rediscovering the Essence of Education. *American School Board Journal*, *169*(7), 17–20.

Bagley, W. C. (1938). *An essentialist's platform for the advancement of American education*.

Benavot, A. (2016). Assuring quality education and learning: Lessons from Education for All. *Prospects*, *46*, 5–14.

Counts, G. S. (1978). *Dare the school build a new social order?* Southern Illinois University Press.

Dewantara, K. H. (1977). Bagian pertama pendidikan. *Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*, *1*, 215.

Dewey, J. (1938). An as experience Education. *Education*.

Dewey, J. (2024). *Democracy and education*. Columbia University Press.

Domanais, M. (2023). Reconstructionism in Education. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4318932

Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *Toward a sociology of education* (pp. 374–386). Routledge.

Freire, P. (2021). Education for critical consciousness. *Education for Critical Consciousness*, 1–208.

Gorski, P. (2005). Education equity and the digital divide. *AACE Review (Formerly AACE Journal)*, *13*(1), 3–45.

Hutchins, R. M. (1978). *The higher learning in America*. AMS Press.

Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.

Kosim, M. (2011). Urgensi pendidikan karakter. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 84–92.

McKenzie, M., & Blenkinsop, S. (2006). An ethic of care and educational practice. *Journal of Adventure Education & Outdoor Learning*, *6*(2), 91–105.

Nicolae, S. (2022). *Plato: The Republic*.

Pakaluk, M. (2005). *Aristotle's Nicomachean ethics: An introduction*. Cambridge University Press.
Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child. Trans. D. Coltman.*
Selwyn, N. (2021). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury Publishing.
Suparlan. (2004). *Mencerdaskan kehidupan bangsa: dari konsepsi sampai dengan implementasi*. Hikayat.
Vlastos, G. (1994). *Socratic studies*. Cambridge University Press.
Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard university press.
Weinstein, C. S., Mignano, A. J., & Romano, M. E. (2007). *Elementary classroom management: Lessons from research and practice*.

Copyright holder:

Meza Hadevi, Mini Puspita Sari, Yogi Rizki Oktara, Susiyanto, Merri Sri Hartati (2025)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

